

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Rubaei, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang : Banyumedia.
- Bernhard Limbong, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan : Jakarta.
- Gunanegara, 2008, *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan : Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*, Tatanusa : Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI : Jakarta.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang Undang*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Media Nusantara : Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju : Bandung.
- Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta , Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-X*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media : Salatiga.
- Umar Said Sugiarto, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta.

Umar Said Sugiharto, dkk, 2015, *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Setara Press : Malang.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Presiden No 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1567 K/21/Mem/2018 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D. 2027

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

C. Jurnal

Endriana, M. S., & Handoko, W. (2022). *Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang*. Notarius, 15(1), 204-219.

Imam Koeswahyono, “*Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*”. Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Brawijaya. Vol. 1 No. 1, Agustus 2008, hal 4.

Natalia Nilamsari, 2014, ”*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Studi Dokumen No 2 Vol.XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr Moestopo

Reko Dwi Salfutra & Rio Armanda Agustian, “*Problematika Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Pangkalpinang*”. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 11 No. 2, Desember 2017, hal 1914

Trie Sakti, “*Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*”. Jurnal Ilmiah BPN. Vol. 8 Nomor 2, Tahun 2007, hal 6-7.

Winda Pitriani, Idham, dan Titik Aminah, “*Analisis Yuridis Pengadaan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Perwujudan Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat (Studi Penelitian Di Bapelitbangda Kota Batam)*.” Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.2 Edisi 1 Januari 2023.

D. Internet

Badan Pusat Statistik, 2019, *Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi*, dalam <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1268/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 13-09-2024, pukul 12:30 WIB.

<https://repository.upstegal.ac.id/5222/3/BAB%20II%20%20Niko%20Bagas%20Prakoso.pdf>, diakses pada tanggal 03-11-2024, pukul 15.02 WIB.

www.iesr.or.id, *Listrik dan Tanah PR Besar Pemerintah*, diakses pada tanggal 13-09-2024, pukul 12.45 WIB.

Yuoky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (<https://www.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda>), diakses pada tanggal 09-03-2025, pukul 14.34 WIB

<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses pada tanggal 09-03-2025, pukul 17.42 WIB.

<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/hapusnya-hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 10-03-2025, pukul 14.44 WIB.

<https://e-journal.uajy.ac.id/2890/2/1HK09046.pdf>, diakses pada tanggal 05-12-2024, pukul 14.40 WIB.

<https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf>, diakses pada tanggal 23-11-2024, pukul 13.33 WIB.

<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2729/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 02-11-2024, pukul 15.33 WIB.